

ALASAN PENOLAKAN PARTAI GERINDRA TERHADAP PRESIDENSIAL THRESHOLD 20% DAN KEPENTINGAN POLITIK JANGKA PENDEK DALAM SISTEM MULTIPARTAI

*M. Iqbal Fathurrahman**

Email: Iqbalatur60@gmail.com

Abstrak

Sistem Multipartai merupakan sistem kepartaian paling kompleks apabila dilihat dari segi jumlah partai politiknya. Kompleksitas tersebut dapat dirasakan mulai dari jenis ideologi partai hingga kepentingan partai politik dalam menentukan kebijakan. Sebagai negara yang menganut sistem tersebut, Indonesia tentu juga menyesuaikan dengan kondisi geopolitik yang ada. Dengan tingginya kepentingan politik yang ada di masyarakat, maka sistem multipartai dipakai di Indonesia untuk mengakomodir berbagai aspirasi dari berbagai golongan. Namun, yang terjadi pada partai politik di Indonesia, terkadang hanya mementingkan kepentingan politik jangka pendek untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata. Pemikiran itu juga terjadi pada kasus pembahasan RUU Pemilu 2017. Salah satu partai yang menolak ialah Partai Gerindra. Sikap Partai Gerindra yang inkonsisten membuat kecurigaan dari penulis bahwa adanya kepentingan politik jangka pendek yang diinginkan oleh Gerindra dengan mengubah presidensial threshold 20%.

Kata Kunci: Partai Politik, Pemilihan Umum, Presidensial Threshold

Abstract

This research uncover the factors that encourage Gerindra choose presidential threshold 0% at discussion of unang-undang pemilu 2017. Has several attitude opposite to election who choose presidential threshold 20%. The attitude is a dilemma on the decision given Gerindra to the issue has several undang-undang pemilu 2017. Certainly has its own reasons why Gerindra finally choose presidential threshold 0%. The excuse put forward by has several eventually disclose some fact ranging from has several ambition political to the public interest. Both interests this has same represent an effect on has several and national politics condition. Analys of this research that the constellation struggle bill 2017 election for has several and the country followed the pluralism simple and extreme.

Keyword : Political Party, General Election, Presidensial Threshold

Pendahuluan

Sebagai partai politik yang relatif baru, Partai Gerindra memang menjadi ancaman dalam persaingan politik di tanah air. Sejak dibentuk pada tahun 2008, Gerindra sudah memiliki basis politiknya dengan berhasil meraih 6% suara dan lolos persyaratan parliamentary threshold. Hasil ini sulit di dapat oleh partai-partai politik lain. Pada Pemilu 2009, setidaknya terdapat 28 partai politik yang gagal lolos parliamentary threshold. Termasuk juga beberapa partai unggulan seperti PBB, PDS, PNI Marhaenisme, PKPI, PKNU dan PBR. Padahal sejumlah partai politik tersebut sudah berdiri sejak awal reformasi. Namun, Gerindra yang baru dibentuk pada awal tahun 2008, mampu lolos ke parlemen. Sejatinya, juga terdapat Partai Hanura yang merupakan partai baru dan lolos parliamentary threshold. Namun, dalam perjalanan politiknya Partai Hanura gagal menyamai pencapaian Gerindra.

Pada pemilihan presiden 2009, Gerindra juga mampu memberikan animo politik yang besar dengan hadirnya Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden bersama Megawati Soekarno Putri. Prabowo merupakan ketua umum Partai Gerindra yang juga sekaligus menjadi ikon penting partai berlambang kepala burung garuda ini. Meski akhirnya kalah dalam pertarungan perebutan RI 1 dan RI 2, PDIP dan Gerindra sama-sama meniti karier politiknya dalam lima tahun kepemimpinan SBY dengan menjadi partai politik oposisi yang selalu mengkritik kebijakan di era tersebut. PDIP dan Gerindra bahkan kompak dalam beberapa kontestasi pemilihan kepala daerah. Mulai dari Pemilihan gubernur DKI Jakarta hingga ranah kabupaten/kota kedua partai politik tersebut sering identik dan menjadi kawan politik.

Kondisi berbeda kemudian di dapati pada Pemilu 2014. PDIP mencalonkan calon presidennya sendiri, Joko Widodo dalam pemilihan presiden. Pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden tampaknya membuat Gerindra kecewa. Karena sebagai kawan politik, Gerindra merasa tak di ajak untuk berdiskusi dan berkoalisi untuk mendukung Joko Widodo. Bahkan PDIP juga dinilai telah mengkhianati perjanjian batu tulis yang sudah dibuat dengan Gerindra untuk Pemilu 2014. Hal ini membuat Gerindra langsung membelokkan kemudi politiknya. Gerindra merubah haluan dalam sekejap dan menjadi lawan berat dari Joko Widodo dan PDIP. Munculnya kembali nama Prabowo Subianto kemudain menjadi lawan berat politik PDIP. Satu-satunya calon presiden yang kemudian diusung oleh koalisi besar Gerindra bersama Golkar, PPP, PAN, PKS, dan PBB. Meski pada akhirnya Prabowo Subianto yang berpasangan Hatta Rajasa pada kontestasi Pemilihan Presiden 2014 tersebut, kandas dengan selisih suara yang tipis. Bahkan hingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Partai Gerindra kembali menjadi partai politik oposisi bersama sejumlah partai politik lainnya hingga detik ini. Berbagai kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM, impor beras hingga masalah pembangunan infrastruktur menjadi konesntrasi kritik dari Gerindra. Animo besar juga terjadi dalam pembahasan RUU Pemilu pada 2017 silam. Pertarungan antara fraksi pendukung pemerintah dan fraksi oposisi di DPR begitu runcing. Utamanya dalam pembahasan Presidential Threshold. Masalah Presidential Threshold menjadi fokus penting dalam pembahasan RUU Pemilu 2017 tersebut. Dimana, parlemen terpecah menjadi dua poros argumen. Argumen pertama ialah datang dari fraksi pendukung pemerintah yang dipimpin oleh PDIP. Fraksi ini terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura. Keenam fraksi tersebut menyetujui Presidential Threshold 20% berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2014. Sedangkan argumen kedua datang dari fraksi oposisi pemerintah yang terdiri dari Gerindra, PKS dan Demokrat. Ada pula fraksi PAN yang sebenarnya menjadi partai politik pendukung pemerintah, namun tetap dalam kasus ini mereka ikut menolak. Keempat fraksi ini menolak presidensial threshold 20% yang berdasarkan dari hasil Pemilu Legislatif 2014.

Peta Pemilihan Paket RUU Pemilu 2017

	PAKET A Presidensial Threshold 20-25%	PAKET B Presidensial Threshold 0%
Parpol Pemilih	PDIP, GOLKAR, PKB, PPP, NASDEM, HANURA	GERINDRA, DEMOKRAT, PAN, PKS
Jumlah Kursi	337 Kursi	223 Kursi

Sikap penolakan presidensial threshold ini sebenarnya cukup kontradiktif dengan sikap Gerindra pada pembentukan RUU Pemilu sebelumnya. Sebelumnya, Gerindra mendukung keberadaan presidensial threshold 20%, bahkan sejumlah elite Gerindra pun menyatakan bahwa Gerindra juga siap apabila presidensial threshold naik hingga 30%. Sikap tersebut ditunjukkan saat masih koalisi bersama PDIP sebelum Pemilu 2014. Penolakan ini juga dinilai cukup aneh. Pasalnya, Gerindra bukanlah partai politik yang memiliki suara yang kecil dalam pemilu. Gerindra bahkan masuk 3 besar suara terbanyak nasional pada Pemilihan Legislatif 2014 lalu. Padahal, Gerindra merupakan partai politik yang relatif masih baru. Namun, mambu memberikan tekanan politik terhadap sejumlah partai politik lain yang lahir lebih awal. Sebagai peraih suara 3 besar nasional, Gerindra malah bersikap menolak presidensial threshold. Padahal, partai-partai politik dengan suara lebih kecil seperti PKB, PPP, NasDem hingga

Hanura setuju dengan penetapan presidential threshold. Maka dari itu, ada alasan tersendiri dari Gerindra kemudian memutuskan untuk menolak presidential threshold 20%.

Presidensialisme Berbasis Multipartai

Sistem pemerintahan presidensial sering dianggap memiliki suatu masalah bawaan. Menurut Linz (1990;1994) menyebut fenomena ini merupakan “the perils of presidentialism”. Karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara legislatif dan eksekutif. Dimana, masalah tersebut terdapat tiga hal, yang pertama adanya dual legitimasi. Kedua lembaga tersebut (eksekutif-legislatif) sama-sama di pilih oleh rakyat. Sehingga, keduanya akan memiliki klaim yang sama bahwa telah dipilih oleh rakyat. Kedua, antara legislatif dan eksekutif memiliki masa jabatan yang tetap. Maka, apabila ada ketidak puasan atas berbagai keputusan dan kebijakan presiden tidak ada jalan lain kecuali harus menunggu masa jabatannya berakhir. Ketiga, seorang presiden ddalam sistem presidensial dapat mengatur-atur legislatif. Maka, apabila terdapat anggota legislatif yang tidak sependapat dan tidak bersahabat dengannya. Maka presiden dapat saja mencari celah-celah kesalahan dan berusaha menguasai legislatif.

Masalah ini akan terlihat lebih buruk dalam sistem multi partai. Dimana presiden yang terpilih cenderung berasal dari kursi legislatif yang tidak mayoritas. Hal ini menyebabkan sangat susah kepada partai pemenang sekalipun untuk mencapai suara mayoritas dalam pemilu legislatif. Hal ini akan berujung pada minoritasnya dukungan legislatif kepada presiden. Pun apabila terdapat sistem koalisi, maka bisa jadi sistem koalisi yang dibangun oleh presiden tidak sepenuhnya bergantung pada koalisi. Sebab, sistem koalisi pada sistem presidensial tidak segenar sistem parlementer yang benar-benar mengejar suara per partai untuk mencapai tujuannya. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya deadlock antara eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain, memperkuat sistem presidensial sangat terkait dengan tersedianya dukungan partai politik yang memadai di lembaga legislatif bagi seorang presiden. Hal ini bisa dilakukan dengan salah satu caranya ialah jumlah partai di legislatif di sederhanakan atau memberikan kemungkinan-kemungkinan tersedianya koalisi partai politik yang cukup untuk mendukung berbagai kebijakan presiden itu sendiri.

Menurut Djayadi Hanan (2012), ada dua aspek utama dari sistem pemilu yang diperhitungkan bila ingin menguatkan kekuatan presiden dalam sistem presidensial yang multipartai. Pertama adalah pelaksanaan waktunya. Ada yang pelaksanaannya serentak ada yang terpisah dalam melaksanakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Lalu kedua,

pada formula elektoral untuk pemilihan presiden juga ada dua varian yakni *plurality* dan *majority runoff*. Dalam formula *plurality*, pemilihan presiden berlangsung hanya satu putaran. Siapapun yang mendapatkan suara terbanyak dia akan terpilih sebagai presiden. Namun, apabila memakai sistem *run off*, maka presiden terpilih harus mencapai suara mayoritas (diatas 50 persen) apabila ingin terpilih sebagai presiden. Apabila tidak ada kandidat yang berhasil mencapai suara 50 persen, maka akan dilakukan putaran kedua antara pemenang pertama dan pemenang kedua. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana dinamika hubungan eksekutif dan legislatif, lalu tingginya tensi antar partai politik dan sebagainya.

Ramlan Surbakti (2010) pula memberi jawaban sementara atas kerawanan dari sistem presidensial yang multipartai hanya ada dua. Penyederhanaan partai merupakan salah satu aspek dari penguatan sistem presidensial. Penyederhanaan legislatif tersebut sebenarnya bukanlah jalan utama, namun bisa saja merupakan sebuah jalan untuk mengatasi lemahnya dukungan-dukungan politik terhadap eksekutif ketika menjalankan pemerintahan. Logikanya ialah ketika bagaimana dukungan politik mayoritas tersebut apabila terdapat koalisi yang multipartai dari partai-partai politik untuk mencapai dukungan presiden dengan presentase yang tinggi, yakni apabila dicapai sebuah koalisi antar partai untuk mendukung presiden dan kebijakn-kebijakannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana dukungan koalisi partai politik tersebut terbentuk untuk mendukung presiden. Salah satunya ialah bagaimana "*coallitional president*" dimana hal ini merupakan kecenderungan presiden untuk membentuk dan mempertahankan sebuah bentuk koalisi yang nantinya akan menjadi alat politik bagi presiden. Hal lain adalah apabila pembelahan ideologi partai politik di dalam parlemen ataupun peserta pemilu tidak terlalu ekstrim, maka koalisi dapat sangat terbentuk begitu cair. Apalagi pimpinan partai politik tersebut memiliki rasa kompromi-kompromi yang begitu kuat. Hal ini akan memudahkan jalan presiden untuk membentuyk koalisi. Baik sifat koalisi tersebut berbentuk permanen atau koalisi per kebijakan.

Hal lain juga yang berpengaruh adalah bagaimana hubungan antara legislatif dan eksekutif. Umumnya, karena kedua lembaga ini sama-sama dipilih oleh rakyat dan punya kekuasaan konstitusional maka dapat dapat mudah hubungan keduanya dipersambungkan dan di berikan intensif yang cukup untuk menemukan final hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, kapasitas kelembagaan dari kedua lembaga juga harus memiliki kapasitas yang sama baiknya, sehingga tidak ada dominasi dari salah satu lembaga kepada lembaga lain. Pada negara-negara yang berada pada awal fase demokratisasi, mereka masih menitik pusatkan kekuasaan pada presiden karena bawaan masa lalu. Sehingga, presiden atau

eksekutif masih berkekuatan lebih dan legislatif tidak memiliki kekuatan yang dapat menyeimbangi eksekutif karena kapasitas kelembagaannya. Sehingga, menimbulkan suatu ketimpangan kapasitas kelembagaan yang pula berpengaruh kepada bagaimana hubungan dan pemutusan berbagai kebijakan nantinya.

Apabila kita menggunakan tiga indikator umum tentang bagaimana pelaksanaan suatu sistem pemerintahan yang telah dikemukakan oleh Hanan (2012), yakni stabilitas demokrasi, tingkat kebuntuan legislatif-eksekutif, dan kinerja pemerintahan. Maka pemerintahan kita tergolong relatif baik. Kerawanan sistem presidensial yang multipartai memang tinggi karena hal ini akan menimbulkan dukungan minoritas terhadap presiden oleh legislatif.¹ Namun, kerawanan tersebut dalam setidaknya beberapa dekade terakhir ini tidak terjadi karena beberapa faktor diluar sistem pemilu yang pada akhirnya membantu bagaimana berfungsinya sistem pemerintahan ini. Pembahasan bersama dan persetujuan bersama menjadi salah satu kunci penting. Dimana antara legislatif an eksekutif saling menguntungkan satu sama lain. Terutama dalam pembuatan anggaran dan pembuatan undang-undang nasional. Selain itu kedua lembaga juga memiliki otoritas kelembagaan konstitusional sendiri-sendiri sehingga ada anacamannya apabila undang-undang tidak dibahas bersama maka rancangan undang-undang dan peraturan tidak akan bisa lolos.

Luky Sandra Amalia dan Syamsudin Haris (2015) melalui bukunya “Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung” pula mengemukakan ketidakstabilan kedua lembaga tersebut. Dalam dinamika perkembangan kelembagaan terkadang terjadi hubungan presiden dan parlemen yang tidak seimbang. Dimana, penentuan kebijakan non konstitusional presiden dipengaruhi oleh kemauan koalisinya di parlemen. Hal ini akan menimbulkan tarik ulur kepentingan yang dimana mereka akan sama-sama mengaku bahwa dipilih oleh rakyat. Kerap kali, hubungan antara presiden dan parlemen mengalami deadlock/kebuntuan politik. Dari studi yang di kemukakan oleh penulis, sejak tahun 1999-2008 terdapat 20 interpelasi yang dimunculkan baik sejak pemerintahan Gusdur, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, tak semua hak interpelasi itu diterima. Hal ini membuktikan bahwa hubungan presiden dan parlemen kerap kali tidak harmonis. Oleh karena itu perlu adanya sistematisasi check and balances yang berfokus pada peran nilai kepemimpinan presidensial. Dalam perioden ke periode kepresidenan, terdapat berbagai macam alasan interpelasi bahkan ketika jaman SBY

pun yang notabene memiliki koalisi partai politik yang ‘gemuk’, juga terdapat hak interpelasi di dalam parlemennya.

Alasan Gerindra Menolak Presidential Threshold 20%

Sebagai partai politik baru, Gerindra cukup berani melakukan terobosan dengan membuat poros baru untuk menolak presidential threshold 20%. Partai baru seperti Hanura, hanya mengekor saja pada keputusan koalisi dan ikut kepentingan koalisi politik pendukung pemerintah. Tindakan Gerindra yang cukup kontradiktif ini ternyata memang memiliki beberapa alasan sendiri. Setidaknya, ada dua faktor yang membuat Gerindra bersikap menolak atas presidential threshold.

Pertama, ialah faktor intern. Faktor intern merupakan faktor-faktor yang memiliki dampak politis secara langsung terhadap Partai Gerindra. Dari faktor intern, tercatat ada tiga faktor yang menjadi penyebab Gerindra menolak presidential threshold 20%. Faktor Intern yang pertama ialah Gerindra tidak dapat mencalonkan calon presidennya sendiri. Apabila merujuk pada UU Pemilu No.7 Tahun 2017, maka Gerindra tidak mampu mencalonkan calon presidennya sendiri. Sebab, pada Pemilihan Legislatif 2014 lalu, Gerindra hanya mampu mengantongi 11,81% suara. Presentase tersebut tentu masih sangat jauh dibandingkan persyaratan presidential threshold 20%. Di sisi lain, terdapat ambisi tersendiri dari Gerindra untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Prabowo memiliki figuritas yang luar biasa di tubuh kader Gerindra sendiri. Sehingga, nama Prabowo selalu menjadi ikon partai dan menjadi poros politik nasional. Ambisi Gerindra untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden juga diikuti dengan tingginya elektabilitas Prabowo dalam berbagai lembaga survei apabila dicalonkan sebagai calon presiden. Bahkan hingga saat ini, Prabowo masih menjadi saingan terberat Joko Widodo dalam survei kontestasi calon presiden menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Faktor Intern kedua ialah Gerindra kalah start dari rival terdekatnya, PDIP. Secara historik, Gerindra sebenarnya pernah memiliki hubungan yang baik dengan Gerindra. Hubungan tersebut kemudian kandas saat pencalonan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2014 silam. Bisa dibayangkan, intrik sakit hati Gerindra lah yang kemudian membuat Gerindra menjadi salah satu rival terberat PDIP saat ini. Utamanya rivalitas sosok Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sebagai rival, tentu Gerindra tak ingin kalah start dari PDIP. Sebab, PDIP sudah mengantongi suara yang cukup signifikan pada Pemilihan Legislatif 2014 lalu, yakni 18% dan paling dekat dengan syarat Presidential Threshold 20%. Hal tersebut membuat PDIP

diuntungkan, sebab mereka hanya butuh partai politik koalisi dengan presentase suara 2% saja untuk mencapai syarat Presidential Threshold. Sedangkan Gerindra membutuhkan kurang lebih 9% suara.

Faktor intern ketiga ialah daya tawar Gerindra untuk mencari rekan koalisi akan semakin sulit. Dengan presentase suara yang kalah dari rivalnya, PDIP. Maka cukup sulit bagi Gerindra untuk mencari sisa suara 9%. Karena Gerindra memiliki presentase suara yang jauh lebih kecil, maka Gerindra membutuhkan lebih banyak partai politik untuk dukungan koalisinya. Al hasil, daya tawar Gerindra kepada partai politik dengan suara lebih kecil lainnya akan semakin sulit. Di samping itu, *bargaining position* Gerindra di mata sejumlah partai politik juga tak sebesar PDIP yang sudah berhasil mengantongi 18% suara.

Selain faktor intern, juga ada faktor lain yang menyebabkan Gerindra menolak Presidential Threshold 20%. Faktor tersebut dinamakan faktor ekstern. Faktor ekstern merupakan faktor yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Gerindra. Bisa juga oleh partai politik lain atau masyarakat secara luas. Dapat diketahui, terdapat lima faktor ekstern yang menyebabkan Gerindra menolak presidensial threshold 20%. Pertama, Gerindra beranggapan bahwa hasil Pemilihan Legislatif 2014 tidak relevan untuk dipakai di Pemilihan Presiden 2019. Hal ini menurut Gerindra, sama saja seperti memakai kembali kertas yang sudah pernah kita robek. Faktor ekstern kedua, Gerindra menganggap bahwa keberadaan presidensial threshold 20% telah mencederai nilai-nilai demokrasi. Dengan adanya batasan dalam mencalonkan calon pemimpin, menurut Gerindra itu adalah hal-hal yang dapat mencederai demokrasi secara tidak langsung.

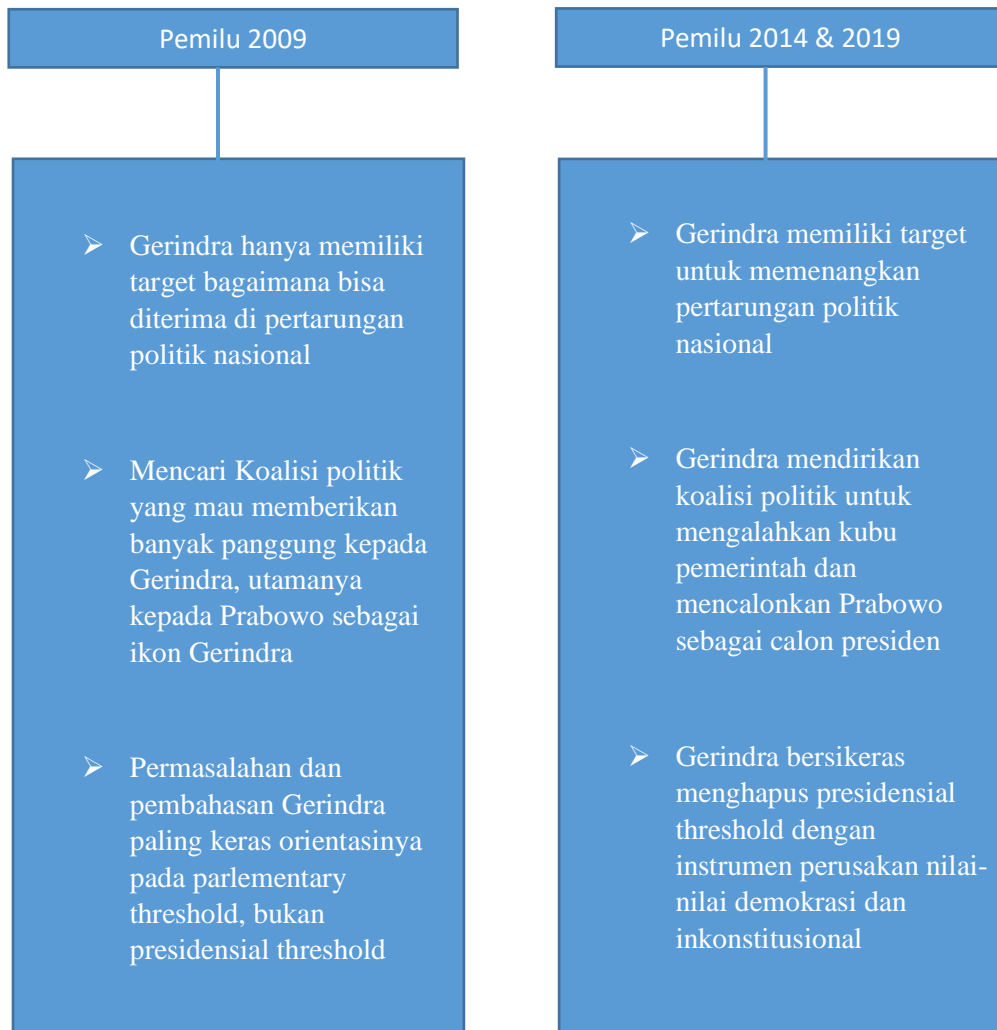
Faktor ekstern ketiga, Gerindra menganggap bahwa keberadaan presidensial threshold juga melanggar UUD 1945 dan inkonstitusional. Undang-Undang tentang pemilihan presiden tidak memuat unsur batasan bagi calon presiden untuk mencalonkan diri. Hal inilah yang disebut Gerindra bahwa presidensial threshold telah mencederai demokrasi. Keempat, Gerindra berpendapat bahwa keberadaan presidensial threshold merupakan bentuk penipuan terhadap rakyat. Dengan iming-iming stabilitas politik, Gerindra mencurigai bahwa adanya penipuan politik terhadap rakyat agar rezim saat ini bisa terus berkuasa. Kelima, Gerindra menyayangkan nasib partai-partai politik kecil. Meskipun partai-partai kecil mendapatkan suara yang cukup besar atau bahkan lolos presidensial threshold sekalipun, namun tetap suara mereka tidak akan dihitung pada pencalonan presiden di Pemilihan Presiden 2019. Hal ini dikarenakan Pemilihan Presiden 2019 akan memakai hasil Pemilihan Legislatif 2014 saja.

Perbedaan Sikap Politik dan Kepentingan Jangka Pendek

Sikap Politik Gerindra padalima tahun lalu dan sekarang, dapat dibilang berbeda. Bahkan hal ini dapat kita analisa dari bagaimana sikap Gerindra menghadapi Presidential Threshold. Dalam lima tahun lalu, Gerindra bahkan berani menyatakan presidential threshold bisa dinaikkan hingga 30%. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani (2012) yang mengtakan bahwa Gerindra siap menaikkan Presidential Threshold bahkan hingga 30% sekalipun. Gerindra bahkan mendukung keputusan penetapan presidential threshold yang masih memakai UU No. 42 Tahun 2008. Berbeda sikap dengan saat ini. Konstelasi yang berbeda membuat Gerindra juga mengubah pola pikirnya terhadap kebijakan presidential threshold. Gerindra menolak dengan keras kebijakan presidential threshold 20% yang diusulkan oleh pemerintah. Inkonsistensi sikap Gerindra ini tentu menimbulkan alasan kecurigaan bagi pengamat. Hal inipun dikaitkan dengan kepentingan politik Gerindra di Pemilu 2019.

Kepentingan politik Gerindra dapat dilihat bverdasarkan posisinya saat ini. Pasca pemilu 2014 dan menjelang pemilu 2019 bagi Gerindra adalah momentum untuk memenangkan pemilu dan menjadikan Prabowo sebagai calon presiden. Bukan lagi sebagai bahan daya tawar kepada partai politik lain. Maka dari itu, mengapa pada 2009 – 2014 Gerindra setuju dengan presidential threshold 0% dan malah serius pada perdebatan parliamentary threshold. Sementara, pada pagaiembahasan RUU Pemilu 2017 Gerindra begitu serius emnegcam presidential threshold 20%. Hal ini terletak pada orientasi dan panggung politik Gerindra saat ini yang tentu lebih memungkinkan. Jumlah massa yang banyak, figuritas seorang Prabowo syang memimpin kelompok oposisi serta kader-kadernya yang solid dan militan. Maka tentu ukuran daya saing yang di perjuangkan saat ini adalah bagaimana bisa mengalahkan kelompok pemerintah.

Perbedaan Dinamika dan Situasi Politik Partai Gerindra



Sebagai partai politik yang memiliki kekuasaan politik yang cukup besar, Gerindra tentu tidak ingin kehilangan momentum menjelang pemilu 2019. Gerindra memiliki potensi suara yang cukup besar dan bahkan mampu menjadi salah satu poros politik nasional saat ini. Salah satu kunci memanfaatkan momentum tersebut terletak pada pembahasan RUU Pemilu 2017 silam. Pembahasan ini berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan pemilu yang juga berkaitan dengan agregasi dan keuntungan politik bagi masing-masing partai politik. Menyadari hal itu, Gerindra tentunya memiliki peran untuk memanfaatkan momentum ini.

Dari hasil temuan, ditemukan adanya indikasi Gerindra ingin mengubah presidensial threshold 0% untuk keuntungan politik dari Gerindra sendiri. Dengan memilih presidensial threshold 0%, maka Gerindra diuntungkan dengan bisa majunya Prabowo Subianto sebagai

calon presiden dari Gerindra tanpa harus koalisi. Dinamika politik yang begitu alot, memang membuat Gerindra sulit membangun pondasi politik bahkan dengan PKS sekalipun. Hal ini membuat Gerindra terpojokkan dengan kondisi saat ini. Dengan presidensial threshold 0%, maka Gerindra akan bisa lebih memiliki daya saing pada kondisi politik yang ada saat ini. Gerindra mampu memberikan daya tawar dan bertarung dalam pemilihan presiden 2019 walau tanpa adanya PKS sekalipun.

Presidensial threshold 0% juga memiliki dampak psikologis yang kuat bagi kekuatan kader partai Gerindra. Selama ini, Gerindra selalu membagi kue politiknya kepada beberapa partai politik yang se-koalisi dengannya. Padahal tidak. Gerindra adalah salah satu partai politik yang memiliki keinginan untuk mendominasi kancah politik melalui pintu-pintu politik yang ada. Sehingga, sebab Gerindra menginginkan presidensial threshold 0% adalah sebuah upaya untuk mengembalikan kedigdayaan Gerindra menjadi salah satu partai politik yang berpengaruh di tanah air, tanpa bergantung pada kepentingan politik lain.

Kemampuan Gerindra untuk bertahan dan bertarung dalam arena politik sudah terbukti pada pemilu 2014. Gerindra mampu mendapatkan suara tiga besar nasional dengan perolehan suara 11,81% dan menduduki 73 kursi di DPR. Gerindra mengalahkan 9 partai politik nasional lain yang bertarung dalam pemilu. Bahkan beberapa partai yang cukup favorit dalam beberapa lembaga survei seperti Demokrat dan PKB, lalu partai-partai lain yang juga menggecarkan kampanyenya seperti Hanura dan NasDem juga dapat dikalahkan suaranya oleh Gerindra. Dengan hanya menggaungkan kekuatan politik kader dengan figur Prabowo Subianto. Namun, Gerindra justru sedang sibuk dengan kontestasi yang seperti ini. Gerindra tidak ingin kehilangan kesempatan pada pemilu 2019.

Namun, sikap Gerindra terhadap presidensial threshold memang bukanlah keputusan yang benar-benar final. Bisa jadi dalam beberapa tahun kedepan, dengan konstelasi politik yang sudah berubah begitu cepat, maka bisa saja keputusan Gerindra saat ini yang menginginkan penghapusan presidensial threshold 20% akan berbalik. Hal tersebut juga telah terlihat dari bagaimana Gerindra bersikap sebelum dan sesudah Pemilu 2014. Bila Gerindra menjadi pemenang pemilu, mungkin saja mereka juga melakukan hal yang sama dengan partai politik fraksi pendukung pemerintahan saat ini untuk mempertahankan presidensial threshold. Namun, Jika Gerindra kalah mungkin akan tetap mempertahankan sikap presidensial threshold 0%. Semua tergantung bagaimana kondisi politik yang ada pada Gerindra sendiri.

Simpulan

Sistem kepartaian multipartai, pada akhirnya menghasilkan sebuah dinamika yang begitu sangat plural dan dinamis. Termasuk pula pada Gerindra. Sebagai partai politik baru, sikap Gerindra cukup cepat berubah saat Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 hingga menjelang Pemilu 2019. Hal ini juga dipengaruhi bagaimana posisi Gerindra dalam struktur kontestasi politik, dimana Gerindra merupakan partai oposisi pemerintah. Bentuk penolakan Gerindra terhadap presidensial threshold 20%, semata-mata ada pada kepentingan politik. Multipartai akan menggantungkan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Jika Gerindra mempersiapkan sikap politik jangka panjang, tentu Gerindra seharusnya tela menolak presidensial threshold sejak awal berdirinya partai.

Penolakan ini juga sebuah bentuk survival politik bagi Gerindra. Partai yang kini menjadi salah satu poros politik terkuat ini, tentu memiliki peran dalam membangun opini konstituennya. Penolakan terhadap presidensial threshold, merupakan bentuk survival politik yang dilakukan Gerindra supaya tetap mempertahankan posisinya sebagai partai politik oposisi yang besar.

Daftar Pustaka

- Khairul Fahmi, 2016. *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syamsudin Haris; 2014. *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta; Buku Obor
- Dirgayuza Setyawan; 2016. *Nilai-nilai Pendekar Pejuang: Prinsip berpolitik, berbisnis dan Menghidupi Hidup Letjen TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto*. Jakarta; Media Kita
- Syamsudin Haris, dkk; 2016. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
LIPI
- Luky Sandra, dkk. *Evaluasi Pemilihan presiden langsung di Indonesia*. Pustaka Belajar. 2016